

4/26/2022

LAPORAN KEGIATAN ANALISIS DATA

Evaluasi Perencanaan dan
Penganggaran Pemerintah Daerah
Tahun 2022



Swesia Yohana A.
NIP. 19891017 201502 2 003

DAFTAR ISI

BAB I	1
DATA UMUM OBYEK PENGAWASAN.....	1
A. Gambaran Umum Topik Pengawasan.....	1
B. Identitas Obyek Pengawasan	1
C. Matrik Desain Pengawasan	2
BAB II.....	4
KEGIATAN ANALISIS DATA	4
A. Kegiatan Analisis Data	4
B. Uraian Analisis Data dan Hasilnya	8
BAB III.....	22
PENUTUP.....	22

BAB I

DATA UMUM OBYEK PENGAWASAN

A. Gambaran Umum Topik Pengawasan

Dalam pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan (kinerja), BPKP melaksanakan kegiatan pengawasan intern terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Untuk mendorong implementasi manajemen pemerintahan yang berorientasi hasil, BPKP melakukan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2022. Penugasan ini termasuk dalam Agenda Pengawasan Prioritas BPKP Tahun 2022 pada Sektor Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah, dengan Tema Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah dan Topik Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah.

Hal yang melatarbelakangi penugasan ini adalah masih dijumpainya kondisi dimana program/kegiatan yang dilaksanakan tidak diikuti dengan hasil yang nyata. Pengeluaran pemerintah dan pelaksanaan program/kegiatan tidak selalu diikuti dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan kinerja dan ukuran kinerja yang ingin disasar tidak didefinisikan dengan baik. Selain itu, program/ kegiatan yang dilaksanakan tidak selaras untuk mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program/kegiatan yang tidak diikuti hasil tersebut merupakan indikasi masih adanya instansi pemerintah berorientasi input (input-oriented), yaitu berfokus pada besaran anggaran yang dieksekusi. Perlu perubahan paradigma manajemen pemerintahan dari input-oriented menjadi result oriented. Instansi pemerintah yang berorientasi hasil akan fokus pada pencapaian kinerja yang telah dihasilkan agar tujuan instansi tersebut dapat dicapai pada akhir periode perencanaan.

B. Identitas Obyek Pengawasan

Evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah Tahun 2022 difokuskan pada 3 (tiga) sektor, yaitu: Pendidikan, Kesehatan dan Ketahanan Pangan. Penetapan fokus bertujuan agar hasil evaluasi dapat memberikan simpulan atas efektivitas dan efisiensi secara lebih komprehensif atas masing-

masing sektor terpilih. Disamping itu, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Agenda Prioritas Pengawasan (APP) BPKP.

Kegiatan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2022 dilakukan di empat tempat, antara lain Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Rokan Hilir. Yang menjadi sasaran evaluasi adalah perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Provinsi/Daerah Tahun 2022 terkait efektivitas dan efisiensi sesuai dengan aturan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yang berlaku, kecuali terdapat aturan khusus yang mengatur hal tersebut. Objek evaluasi perencanaan dan penganggaran adalah:

1. Pada tingkat sasaran strategis pemerintah daerah, evaluasi dilakukan atas sasaran strategis pemerintah daerah yang terkait dengan Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Ketahanan Pangan.
2. Pada tingkat Perangkat Daerah, evaluasi dilakukan atas Perangkat Daerah yang berperan penting dalam mencapai sasaran strategis pemerintah daerah yang terkait dengan Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Ketahanan Pangan.

Ruang lingkup evaluasi meliputi dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yang telah disahkan untuk Tahun Anggaran 2022, namun tidak termasuk proses penyusunan perencanaan dan penganggaran serta realisasi dari perencanaan dan anggaran pemerintah daerah. Evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah Tahun 2022 dilakukan terhadap Sasaran Strategis Pemerintah Daerah, Sasaran Perangkat Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah beserta rincian anggarannya.

C. Matrik Desain Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan intern atas perencanaan dan penganggaran APBD dilakukan dengan cara evaluasi. Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), pengertian evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Evaluasi atas perencanaan dan penganggaran ini lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan rekomendasi. Salah satu langkah awal dalam melaksanakan evaluasi adalah

memastikan bahwa mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah telah menggunakan aturan yang berlaku kecuali ada pengaturan lebih khusus yang membahas hal tersebut.

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi perencanaan dan penganggaran dilakukan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), antara lain:

1. Pengumpulan data;
2. Analisis data melalui desk evaluation;
3. Wawancara dan konfirmasi data melalui field evaluation atau on line meeting;
4. Panel Perwakilan untuk mengkalibrasi hasil evaluasi pada level perwakilan;
5. Pembahasan hasil evaluasi dengan Pemda.

BAB II

KEGIATAN ANALISIS DATA

A. Kegiatan Analisis Data

Menurut Bogdan dan Taylor (1975), analisis data adalah suatu proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis, sedangkan Lexy J. Moleong (2002) menyatakan analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data digunakan untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu membuat kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel, yang biasanya dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian. Kegiatan analisis data ini kemudian diimplementasikan untuk menarik kesimpulan atas hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan terhadap 1 (satu) Pemerintah Provinsi dan 3 (tiga) Pemerintah Kabupaten di Provinsi Riau.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah Tahun 2022 yang dilakukan di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir, didapatkan data sebagai berikut:

1. Jumlah Sub Kegiatan dan Total Anggaran yang Dievaluasi

Tabel 2.1
Sub Kegiatan dan Anggaran yang Dievaluasi

Nama Pemda	Nama Sektor	Nama OPD	Total Sub Kegiatan	Total Anggaran yang di Evaluasi (Rp)
Provinsi Riau	Ketahanan Pangan	Dinas Kelautan dan Perikanan	11	11.607.112.280,00
Provinsi Riau	Kesehatan	Dinas Kesehatan	41	417.713.680.579,00
Provinsi Riau	Ketahanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	21	47.876.878.485,00
Provinsi Riau	Kesehatan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11	179.933.810.695,00

Nama Pemda	Nama Sektor	Nama OPD	Total Sub Kegiatan	Total Anggaran yang di Evaluasi (Rp)
Provinsi Riau	Pendidikan	Dinas Pendidikan	29	1.053.758.038.652,00
Provinsi Riau	Ketahanan Pangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4	475.369.371,00
Provinsi Riau	Ketahanan Pangan	Dinas Perkebunan	9	3.988.685.203,00
Provinsi Riau	Ketahanan Pangan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	13	31.401.603.388,00
TOTAL PROVINSI RIAU			139	1.746.755.178.653,00
Kab Bengkalis	Kesehatan	Dinas Kesehatan	40	156.253.573.438,00
Kab Bengkalis	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	13	2.202.306.000,00
Kab Bengkalis	Kesehatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4	66.118.200.500,00
Kab Bengkalis	Pendidikan	Dinas Pendidikan	55	298.371.219.515,00
Kab Bengkalis	Ketahanan Pangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7	12.319.667.035,00
Kab Bengkalis	Ketahanan Pangan	Dinas Perikanan	33	10.894.289.900,00
Kab Bengkalis	Ketahanan Pangan	Dinas Perkebunan	14	20.321.878.800,00
Kab Bengkalis	Kesehatan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3	139.125.354.100,00
Kab Bengkalis	Ketahanan Pangan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	16	24.028.568.167,00
Kab Bengkalis	Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	12	40.584.192.994,00
Kab Bengkalis	Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	8	44.908.323.428,00
TOTAL KABUPATEN BENGKALIS			205	815.127.573.877,00
Kab Rohul	Kesehatan	Dinas Kesehatan	39	14.243.050.233,00
Kab Rohul	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5	627.369.900,00
Kab Rohul	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	26	26.736.844.004,00
Kab Rohul	Ketahanan Pangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	2.000.000.000,00
Kab Rohul	Kesehatan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	10.044.873.137,00
Kab Rohul	Ketahanan Pangan	Dinas Peternakan dan Perkebunan	6	9.097.476.206,00
Kab Rohul	Ketahanan Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	10	3.704.479.000,00
TOTAL KABUPATEN ROKAN HULU			93	66.454.092.480,00
Kab Rohil	Ketahanan Pangan	Dinas Kelautan dan Perikanan	10	6.235.292.847,00

Nama Pemda	Nama Sektor	Nama OPD	Total Sub Kegiatan	Total Anggaran yang di Evaluasi (Rp)
Kab Rohil	Kesehatan	Dinas Kesehatan	53	58.971.912.134,00
Kab Rohil	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10	8.650.044.747,00
Kab Rohil	Kesehatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	3.400.000.000,00
Kab Rohil	Pendidikan	Dinas Pendidikan	44	206.169.652.442,00
Kab Rohil	Ketahanan Pangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4	2.083.847.352,00
Kab Rohil	Kesehatan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7	40.365.573.344,00
TOTAL KABUPATEN ROKAN HILIR			130	325.876.322.866,00

2. Jumlah Sub Kegiatan dan Total Anggaran yang Efektif, Tidak Efisien dan Tidak Efektif

Tabel 2.2
Sub Kegiatan dan Anggaran yang Efektif, Tidak Efisien, dan Tidak Efektif

Nama Pemda	Nama OPD	Efektif	Efektif (Rp)	Tidak Efisien (Rp)	Tidak Efektif	Tidak Efektif (Rp)
Provinsi Riau	Dinas Kelautan dan Perikanan	11	11.607.112.280,00	-	0	-
Provinsi Riau	Dinas Kesehatan	41	417.713.680.579,00	-	0	-
Provinsi Riau	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	9	45.352.712.644,00	145.000.000,00	12	2.524.165.841,00
Provinsi Riau	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11	179.933.810.695,00	-	0	-
Provinsi Riau	Dinas Pendidikan	29	1.053.758.038.652,00	181.080.000,00	0	-
Provinsi Riau	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4	475.369.371,00	-	0	-
Provinsi Riau	Dinas Perkebunan	4	2.806.702.256,00	-	5	1.181.982.947,00
Provinsi Riau	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	13	31.401.603.388,00	15.000.000,00	0	-
TOTAL PROVINSI RIAU		122	1.743.049.029.865,00	341.080.000,00	17	3.706.148.788,00
Kab Bengkalis	Dinas Kesehatan	40	156.253.573.438,00	160.000.000,00	0	-

Nama Pemda	Nama OPD	Efektif	Efektif (Rp)	Tidak Efisien (Rp)	Tidak Efektif	Tidak Efektif (Rp)
Kab Bengkulu	Dinas Ketahanan Pangan	13	2.202.306.000,00	-	0	-
Kab Bengkulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4	66.118.200.500,00	4.203.969.000,00	0	-
Kab Bengkulu	Dinas Pendidikan	52	293.983.928.615,00	-	3	4.387.290.900,00
Kab Bengkulu	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7	12.319.667.035,00	-	0	-
Kab Bengkulu	Dinas Perikanan	26	10.499.576.500,00	-	7	394.713.400,00
Kab Bengkulu	Dinas Perkebunan	14	20.321.878.800,00	-	0	-
Kab Bengkulu	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3	139.125.354.100,00	19.532.400.000,00	0	-
Kab Bengkulu	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	16	24.028.568.167,00	123.881.000,00	0	-
Kab Bengkulu	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu	12	40.584.192.994,00	-	0	-
Kab Bengkulu	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	8	44.908.323.428,00	-	0	-
TOTAL KABUPATEN BENGKALIS		195	810.345.569.577,00	24.020.250.000,00	10	4.782.004.300,00
Kab Rohul	Dinas Kesehatan	32	14.221.839.433,00	4.020.000,00	7	21.210.800,00
Kab Rohul	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5	627.369.900,00	-	0	-
Kab Rohul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	24	26.176.843.704,00	-	2	560.000.300,00
Kab Rohul	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	2.000.000.000,00	-	0	-
Kab Rohul	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	10.044.873.137,00	-	0	-
Kab Rohul	Dinas Peternakan dan Perkebunan	5	5.875.517.006,00	-	1	3.221.959.200,00
Kab Rohul	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	9	2.607.554.000,00	165.000.000,00	1	1.096.925.000,00
TOTAL KABUPATEN ROHUL		82	61.553.997.180,00	169.020.000,00	11	4.900.095.300,00
Kab Rohil	Dinas Kelautan dan Perikanan	10	6.235.292.847,00	-	0	-

Nama Pemda	Nama OPD	Efektif	Efektif (Rp)	Tidak Efisien (Rp)	Tidak Efektif	Tidak Efektif (Rp)
Kab Rohil	Dinas Kesehatan	53	58.971.912.134,00	1.759.378.500,00	0	-
Kab Rohil	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10	8.650.044.747,00	-	0	-
Kab Rohil	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	-	-	2	3.400.000.000,00
Kab Rohil	Dinas Pendidikan	42	205.215.815.430,00	687.101.000,00	2	953.837.012,00
Kab Rohil	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4	2.083.847.352,00	-	0	-
Kab Rohil	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	34.290.573.344,00	-	1	6.075.000.000,00
TOTAL KABUPATEN ROHIL		125	315.447.485.854,00	2.446.479.500,00	5	10.428.837.012,00

B. Uraian Analisis Data dan Hasilnya

Simpulan atas evaluasi efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu tepat, tidak tepat, efektif, berpotensi tidak efektif, dan berpotensi tidak efisien. Kategori tepat dan tidak tepat merupakan parameter yang digunakan untuk menilai sasaran strategis, program dan kegiatan perangkat daerah. Sedangkan kategori efektif, berpotensi tidak efektif, dan tidak efisien merupakan parameter yang digunakan untuk menilai sub kegiatan perangkat daerah. Dalam analisis data untuk laporan ini, yang akan dianalisis adalah informasi terkait efektivitas, potensi tidak efektif dan potensi tidak efisien.

Berikut adalah hasil analisis data atas evaluasi yang dilakukan terhadap perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah Tahun 2022 yang dilakukan di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir:

1. Tingkat Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran pada Pemerintah Provinsi/Daerah

a) Provinsi Riau

Sub kegiatan yang efektif sebanyak 122 sub kegiatan atau sebesar 87,77% dari total 139 sub kegiatan, dengan nilai efektif sebanyak Rp1.743.049.029.865,00 atau sebesar 99,79% dari total anggaran Rp1.746.755.178.653,00 yang dievaluasi pada 8 (delapan) Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sub Kegiatan dan Anggaran Efektif di Provinsi Riau

Nama OPD	Total Sub Kegiatan	Total Anggaran yang di Evaluasi	Efektif		% Efektif	
			Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan	11	11.607.112.280,00	11	11.607.112.280,00	100,00	100,00
Dinas Kesehatan	41	417.713.680.579,00	41	417.713.680.579,00	100,00	100,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	21	47.876.878.485,00	9	45.352.712.644,00	42,86	94,73
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11	179.933.810.695,00	11	179.933.810.695,00	100,00	100,00
Dinas Pendidikan	29	1.053.758.038.652,00	29	1.053.758.038.652,00	100,00	100,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4	475.369.371,00	4	475.369.371,00	100,00	100,00
Dinas Perkebunan	9	3.988.685.203,00	4	2.806.702.256,00	44,44	70,37
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	13	31.401.603.388,00	13	31.401.603.388,00	100,00	100,00
TOTAL	139	1.746.755.178.653,00	122	1.743.049.029.865,00	87,77	99,79

b) Kabupaten Bengkalis

Sub kegiatan yang efektif sebanyak 195 sub kegiatan atau sebesar 95,12% dari total 205 sub kegiatan, dengan nilai efektif sebanyak Rp1.743.049.029.865,00 atau sebesar 99,79% dari total anggaran Rp815.127.573.877,00 yang dievaluasi pada 11 (sebelas) Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sub Kegiatan dan Anggaran Efektif di Kabupaten Bengkalis

Nama OPD	Total Sub Kegiatan	Total Anggaran yang di Evaluasi	Efektif		% Efektif	
			Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Anggaran
Dinas Kesehatan	40	156.253.573.438,00	40	156.253.573.438,00	100,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan	13	2.202.306.000,00	13	2.202.306.000,00	100,00	100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4	66.118.200.500,00	4	66.118.200.500,00	100,00	100,00
Dinas Pendidikan	55	298.371.219.515,00	52	293.983.928.615,00	94,55	98,53
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7	12.319.667.035,00	7	12.319.667.035,00	100,00	100,00

Nama OPD	Total Sub Kegiatan	Total Anggaran yang di Evaluasi	Efektif		% Efektif	
			Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Anggaran
Dinas Perikanan	33	10.894.289.900,00	26	10.499.576.500,00	78,79	96,38
Dinas Perkebunan	14	20.321.878.800,00	14	20.321.878.800,00	100,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3	139.125.354.100,00	3	139.125.354.100,00	100,00	100,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	16	24.028.568.167,00	16	24.028.568.167,00	100,00	100,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	12	40.584.192.994,00	12	40.584.192.994,00	100,00	100,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	8	44.908.323.428,00	8	44.908.323.428,00	100,00	100,00
TOTAL	205	815.127.573.877,00	195	810.345.569.577,00	95,12	99,41

c) Kabupaten Rokan Hulu

Sub kegiatan yang efektif sebanyak 82 sub kegiatan atau sebesar 88,17% dari total 93 sub kegiatan, dengan nilai efektif sebanyak Rp61.553.997.180,00 atau sebesar 92,63% dari total anggaran Rp66.454.092.480,00 yang dievaluasi pada 7 (tujuh) Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Sub Kegiatan dan Anggaran Efektif di Kabupaten Rokan Hulu

Nama OPD	Total Sub Kegiatan	Total Anggaran yang di Evaluasi	Efektif		% Efektif	
			Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Anggaran
Dinas Kesehatan	39	14.243.050.233,00	32	14.221.839.433,00	82,05	99,85
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5	627.369.900,00	5	627.369.900,00	100,00	100,00
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	26	26.736.844.004,00	24	26.176.843.704,00	92,31	97,91
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	100,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	10.044.873.137,00	6	10.044.873.137,00	100,00	100,00
Dinas Peternakan dan Perkebunan	6	9.097.476.206,00	5	5.875.517.006,00	83,33	64,58

Nama OPD	Total Sub Kegiatan	Total Anggaran yang di Evaluasi	Efektif		% Efektif	
			Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Anggaran
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	10	3.704.479.000,00	9	2.607.554.000,00	90,00	70,39
TOTAL	93	66.454.092.480,00	82	61.553.997.180,00	88,17	92,63

d) Kabupaten Rokan Hilir

Sub kegiatan yang efektif sebanyak 125 sub kegiatan atau sebesar 96,15% dari total 130 sub kegiatan, dengan nilai efektif sebanyak Rp315.447.485.854,00 atau sebesar 96,80% dari total anggaran Rp325.876.322.866,00 yang dievaluasi pada 7 (tujuh) Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Sub Kegiatan dan Anggaran Efektif di Kabupaten Rokan Hilir

Nama OPD	Total Sub Kegiatan	Total Anggaran yang di Evaluasi	Efektif		% Efektif	
			Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan	10	6.235.292.847,00	10	6.235.292.847,00	100,00	100,00
Dinas Kesehatan	53	58.971.912.134,00	53	58.971.912.134,00	100,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10	8.650.044.747,00	10	8.650.044.747,00	100,00	100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	3.400.000.000,00	0	-	0,00	0,00
Dinas Pendidikan	44	206.169.652.442,00	42	205.215.815.430,00	95,45	99,54
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4	2.083.847.352,00	4	2.083.847.352,00	100,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7	40.365.573.344,00	6	34.290.573.344,00	85,71	84,95
TOTAL	130	325.876.322.866,00	125	315.447.485.854,00	96,15	96,80

2. Tingkat Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran pada Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ketahanan Pangan

a) Sektor Pendidikan

Sub kegiatan sektor pendidikan yang efektif sebanyak 147 sub kegiatan atau sebesar 95,45% dari total 154 sub kegiatan, dengan nilai efektif sebanyak Rp1.579.134.626.401,00 atau sebesar 99,63% dari total

anggaran Rp1.585.035.754.613,00 yang dievaluasi pada 4 (empat) Pemerintah Provinsi/Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Sub Kegiatan dan Anggaran Efektif pada Sektor Pendidikan

Nama Pemda	Nama OPD	Total Sub Kegiatan	Total Anggaran yang di Evaluasi	Efektif		% Efektif	
				Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Anggaran
Provinsi Riau	Dinas Pendidikan	29	1.053.758.038.652,00	29	1.053.758.038.652,00	100,00	100,00
Kab Bengkalis	Dinas Pendidikan	55	298.371.219.515,00	52	293.983.928.615,00	94,55	98,53
Kab Rohul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	26	26.736.844.004,00	24	26.176.843.704,00	92,31	97,91
Kab Rohil	Dinas Pendidikan	44	206.169.652.442,00	42	205.215.815.430,00	95,45	99,54
TOTAL		154	1.585.035.754.613,00	147	1.579.134.626.401,00	95,45	99,63

b) Sektor Kesehatan

Sub kegiatan sektor kesehatan yang efektif sebanyak 216 sub kegiatan atau sebesar 95,58% dari total 226 sub kegiatan, dengan nilai efektif sebanyak Rp1.162.166.333.782,00 atau sebesar 99,19% dari total anggaran Rp1.171.662.544.582,00 yang dievaluasi pada 4 (empat) Pemerintah Provinsi/Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8
Sub Kegiatan dan Anggaran Efektif pada Sektor Kesehatan

Nama Pemda	Nama OPD	Total Sub Kegiatan	Total Anggaran yang di Evaluasi	Efektif		% Efektif	
				Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Anggaran
Provinsi Riau	Dinas Kesehatan	41	417.713.680.579,00	41	417.713.680.579,00	100,00	100,00
Provinsi Riau	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11	179.933.810.695,00	11	179.933.810.695,00	100,00	100,00
Kab Bengkalis	Dinas Kesehatan	40	156.253.573.438,00	40	156.253.573.438,00	100,00	100,00
Kab Bengkalis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4	66.118.200.500,00	4	66.118.200.500,00	100,00	100,00
Kab Bengkalis	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3	139.125.354.100,00	3	139.125.354.100,00	100,00	100,00

Nama Pemda	Nama OPD	Total Sub Kegiatan	Total Anggaran yang di Evaluasi	Efektif		% Efektif	
				Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Anggaran
Kab Bengkalis	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	12	40.584.192.994,00	12	40.584.192.994,00	100,00	100,00
Kab Bengkalis	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	8	44.908.323.428,00	8	44.908.323.428,00	100,00	100,00
Kab Rohul	Dinas Kesehatan	39	14.243.050.233,00	32	14.221.839.433,00	82,05	99,85
Kab Rohul	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	10.044.873.137,00	6	10.044.873.137,00	100,00	100,00
Kab Rohil	Dinas Kesehatan	53	58.971.912.134,00	53	58.971.912.134,00	100,00	100,00
Kab Rohil	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	3.400.000.000,00	0	-	-	-
Kab Rohil	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7	40.365.573.344,00	6	34.290.573.344,00	85,71	84,95
TOTAL		226	1.171.662.544.582,00	216	1.162.166.333.782,00	95,58	99,19

c) Sektor Ketahanan Pangan

Sub kegiatan sektor kesehatan yang efektif sebanyak 161 sub kegiatan atau sebesar 86,10% dari total 187 sub kegiatan, dengan nilai efektif sebanyak Rp189.095.122.293,00 atau sebesar 95,74% dari total anggaran Rp197.514.868.681,00 yang dievaluasi pada 4 (empat) Pemerintah Provinsi/Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9
Sub Kegiatan dan Anggaran Efektif pada Sektor Ketahanan Pangan

Nama Pemda	Nama OPD	Total Sub Kegiatan	Total Anggaran yang di Evaluasi	Efektif		% Efektif	
				Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Anggaran
Provinsi Riau	Dinas Kelautan dan Perikanan	11	11.607.112.280,00	11	11.607.112.280,00	100,00	100,00
Provinsi Riau	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	21	47.876.878.485,00	9	45.352.712.644,00	42,86	94,73
Provinsi Riau	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4	475.369.371,00	4	475.369.371,00	100,00	100,00
Provinsi Riau	Dinas Perkebunan	9	3.988.685.203,00	4	2.806.702.256,00	44,44	70,37
Provinsi Riau	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	13	31.401.603.388,00	13	31.401.603.388,00	100,00	100,00
Kab Bengkalis	Dinas Ketahanan Pangan	13	2.202.306.000,00	13	2.202.306.000,00	100,00	100,00

Nama Pemda	Nama OPD	Total Sub Kegiatan	Total Anggaran yang di Evaluasi	Efektif		% Efektif	
				Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Anggaran
Kab Bengkalis	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7	12.319.667.035,00	7	12.319.667.035,00	100,00	100,00
Kab Bengkalis	Dinas Perikanan	33	10.894.289.900,00	26	10.499.576.500,00	78,79	96,38
Kab Bengkalis	Dinas Perkebunan	14	20.321.878.800,00	14	20.321.878.800,00	100,00	100,00
Kab Bengkalis	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	16	24.028.568.167,00	16	24.028.568.167,00	100,00	100,00
Kab Rohul	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5	627.369.900,00	5	627.369.900,00	100,00	100,00
Kab Rohul	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	100,00	100,00
Kab Rohul	Dinas Peternakan dan Perkebunan	6	9.097.476.206,00	5	5.875.517.006,00	83,33	64,58
Kab Rohul	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	10	3.704.479.000,00	9	2.607.554.000,00	90,00	70,39
Kab Rohil	Dinas Kelautan dan Perikanan	10	6.235.292.847,00	10	6.235.292.847,00	100,00	100,00
Kab Rohil	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10	8.650.044.747,00	10	8.650.044.747,00	100,00	100,00
Kab Rohil	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4	2.083.847.352,00	4	2.083.847.352,00	100,00	100,00
TOTAL		187	197.514.868.681,00	161	189.095.122.293,00	86,10	95,74

3. Potensi Tidak Efektif dan Tidak Efisien pada Pemerintah Provinsi/Daerah

a) Provinsi Riau

Terdapat 17 sub kegiatan atau 12,23% dari total sub kegiatan yang berpotensi tidak efektif senilai Rp4.900.095.300 atau 0,21% dari total anggaran, dan yang berpotensi tidak efisien sebesar Rp341.080.000,00 atau 0,02% dari total anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.10
Sub Kegiatan dan Anggaran Berpotensi Tidak Efektif dan Tidak Efisien di Provinsi Riau

Nama OPD	Tidak Efisien (Rp)	% Tidak Efisien	Tidak Efektif		% Tidak Efektif	
			Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	0	-	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	-	-	0	-	0,00	0,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	145.000.000,00	0,30	12	2.524.165.841,00	57,14	5,27
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	0	-	0,00	0,00

Nama OPD	Tidak Efisien (Rp)	% Tidak Efisien	Tidak Efektif		%Tidak Efektif	
			Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Anggaran
Dinas Pendidikan	181.080.000,00	0,02	0	-	0,00	0,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	0	-	0,00	0,00
Dinas Perkebunan	-	-	5	1.181.982.947,00	55,56	29,63
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15.000.000,00	0,05	0	-	0,00	0,00
TOTAL	341.080.000,00	0,02	17	3.706.148.788,00	12,23	0,21

Berdasarkan tabel di atas, anggaran tidak efisien paling banyak berasal dari Dinas Pendidikan sebesar Rp181.080.000,00 dan anggaran tidak efektif paling banyak berasal dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp2.524.165.841,00. Dari seluruh OPD yang dievaluasi, rata-rata anggaran yang tidak efisien sebesar Rp42.635.000,00 dan rata-rata anggaran yang tidak efektif sebesar Rp463.268.598,50.

b) Kabupaten Bengkulu

Terdapat 10 sub kegiatan atau 4,88% dari total sub kegiatan yang berpotensi tidak efektif senilai Rp4.782.004.300,00 atau 0,59% dari total anggaran, dan yang berpotensi tidak efisien sebesar Rp24.020.250.000,00 atau 2,95% dari total anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.11
Sub Kegiatan dan Anggaran Berpotensi Tidak Efektif dan Tidak Efisien di Kabupaten Bengkulu

Nama OPD	Tidak Efisien (Rp)	% Tidak Efisien	Tidak Efektif		%Tidak Efektif	
			Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Anggaran
Dinas Kesehatan	160.000.000,00	0,10	0	-	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	-	-	0	-	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.203.969.000,00	6,36	0	-	0,00	0,00
Dinas Pendidikan	-	-	3	4.387.290.900,00	5,45	1,47
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	-	0	-	0,00	0,00
Dinas Perikanan	-	-	7	394.713.400,00	21,21	3,62
Dinas Perkebunan	-	-	0	-	0,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19.532.400.000,00	14,04	0	-	0,00	0,00

Nama OPD	Tidak Efisien (Rp)	% Tidak Efisien	Tidak Efektif		%Tidak Efektif	
			Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Anggaran
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	123.881.000,00	0,52	0	-	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	-	-	0	-	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	-	-	0	-	0,00	0,00
TOTAL	24.020.250.000,00	2,95	10	4.782.004.300,00	4,88	0,59

Berdasarkan tabel di atas, anggaran tidak efisien paling banyak berasal dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp19.532.400.000,00 dan anggaran tidak efektif paling banyak berasal dari Dinas Pendidikan sebesar Rp4.387.290.900,00. Dari seluruh OPD yang dievaluasi, rata-rata anggaran yang tidak efisien sebesar Rp2.183.659.090,91 dan rata-rata anggaran yang tidak efektif sebesar Rp434.727.663,64.

c) Kabupaten Rokan Hulu

Terdapat 11 sub kegiatan atau 11,83% dari total sub kegiatan yang berpotensi tidak efektif senilai Rp4.900.095.300,00 atau 7,37% dari total anggaran, dan yang berpotensi tidak efisien sebesar Rp169.020.000,00 atau 0,25% dari total anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.12
Sub Kegiatan dan Anggaran Berpotensi Tidak Efektif dan Tidak Efisien di Kabupaten Rokan Hulu

Nama OPD	Tidak Efisien (Rp)	% Tidak Efisien	Tidak Efektif		%Tidak Efektif	
			Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Anggaran
Dinas Kesehatan	160.000.000,00	0,10	0	-	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	-	-	0	-	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	4.020.000,00	0,03	7	21.210.800,00	17,95	0,15
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	-	0	-	0,00	0,00
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	2	560.000.300,00	7,69	2,09
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	0	-	0,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	0	-	0,00	0,00

Nama OPD	Tidak Efisien (Rp)	% Tidak Efisien	Tidak Efektif		%Tidak Efektif	
			Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Anggaran
Dinas Peternakan dan Perkebunan	-	-	1	3.221.959.200,00	16,67	35,42
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	165.000.000,00	4,45	1	1.096.925.000,00	10,00	29,61
TOTAL	169.020.000,00	0,25	11	4.900.095.300,00	11,83	7,37

Berdasarkan tabel di atas, anggaran tidak efisien paling banyak berasal dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp165.000.000,00 dan anggaran tidak efektif paling banyak berasal dari Dinas Peternakan dan Perkebunan sebesar Rp3.221.959.200,00. Dari seluruh OPD yang dievaluasi, rata-rata anggaran yang tidak efisien sebesar Rp24.145.714,29 dan rata-rata anggaran yang tidak efektif sebesar Rp700.013.614,29.

d) Kabupaten Rokan Hilir

Terdapat 5 sub kegiatan atau 3,85% dari total sub kegiatan yang berpotensi tidak efektif senilai Rp10.428.837.012,00 atau 3,20% dari total anggaran, dan yang berpotensi tidak efisien sebesar Rp2.446.479.500,00 atau 0,75% dari total anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.13
Sub Kegiatan dan Anggaran Berpotensi Tidak Efektif dan Tidak Efisien di Kabupaten Rokan Hilir

Nama OPD	Tidak Efisien (Rp)	% Tidak Efisien	Tidak Efektif		%Tidak Efektif	
			Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	0	-	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	1.759.378.500,00	2,98	0	-	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	-	0	-	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	2	3.400.000.000,00	100,00	100,00
Dinas Pendidikan	687.101.000,00	0,33	2	953.837.012,00	4,55	0,46
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	0	-	0,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	1	6.075.000.000,00	14,29	15,05
TOTAL	2.446.479.500,00	0,75	5	10.428.837.012,00	3,85	3,20

Berdasarkan tabel di atas, anggaran tidak efisien paling banyak berasal dari Dinas Kesehatan sebesar Rp1.759.378.500,00 dan anggaran tidak efektif

paling banyak berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6.075.000.000,00. Dari seluruh OPD yang dievaluasi, rata-rata anggaran yang tidak efisien sebesar Rp349.497.071,43 dan rata-rata anggaran yang tidak efektif sebesar Rp1.489.833.858,86.

4. Potensi Tidak Efektif dan Tidak Efisien pada Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ketahanan Pangan

a) Sektor Pendidikan

Terdapat 7 sub kegiatan atau 4,55% dari total sub kegiatan yang berpotensi tidak efektif senilai Rp5.901.128.212,00 atau 0,37% dari total anggaran, dan yang berpotensi tidak efisien sebesar Rp868.181.000,00 atau 0,05% dari total anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.14
Sub Kegiatan dan Anggaran Berpotensi Tidak Efektif dan Tidak Efisien di Sektor Pendidikan

Nama Pemda	Nama OPD	Tidak Efisien	% Tidak Efisien	Tidak Efektif		% Tidak Efektif	
				Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
Provinsi Riau	Dinas Pendidikan	181.080.000,00	0,02	0	-	0,00	0,00
Kab Bengkalis	Dinas Pendidikan	-	-	3	4.387.290.900,00	5,45	1,47
Kab Rohul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	2	560.000.300,00	7,69	2,09
Kab Rohil	Dinas Pendidikan	687.101.000,00	0,33	2	953.837.012,00	4,55	0,46
TOTAL SEKTOR PENDIDIKAN		868.181.000,00	0,05	7	5.901.128.212,00	4,55	0,37

Berdasarkan tabel di atas, anggaran tidak efisien paling banyak berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp687.101.000,00 dan anggaran tidak efektif paling banyak berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp4.387.290.900,00. Dari Provinsi dan Kabupaten yang dievaluasi, rata-rata anggaran yang tidak efisien sebesar Rp217.045.250,00 dan rata-rata anggaran yang tidak efektif sebesar Rp1.475.282.053,00.

b) Sektor Kesehatan

Terdapat 10 sub kegiatan atau 4,42% dari total sub kegiatan yang berpotensi tidak efektif senilai Rp9.496.210.800,00 atau 0,81% dari total

anggaran, dan yang berpotensi tidak efisien sebesar Rp25.659.767.500,00 atau 2,19% dari total anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.15
Sub Kegiatan dan Anggaran Berpotensi Tidak Efektif dan Tidak Efisien di Sektor Kesehatan

Nama Pemda	Nama OPD	Tidak Efisien	% Tidak Efisien	Tidak Efektif		% Tidak Efektif	
				Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
Provinsi Riau	Dinas Kesehatan	-	-	0	-	0,00	0,00
Provinsi Riau	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	0	-	0,00	0,00
Kab Bengkalis	Dinas Kesehatan	160.000.000,00	0,10	0	-	0,00	0,00
Kab Bengkalis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.203.969.000,00	6,36	0	-	0,00	0,00
Kab Bengkalis	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19.532.400.000,00	14,04	0	-	0,00	0,00
Kab Bengkalis	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	-	-	0	-	0,00	0,00
Kab Bengkalis	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	-	-	0	-	0,00	0,00
Kab Rohul	Dinas Kesehatan	4.020.000,00	0,03	7	21.210.800,00	17,95	0,15
Kab Rohul	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	0	-	0,00	0,00
Kab Rohil	Dinas Kesehatan	1.759.378.500,00	2,98	0	-	0,00	0,00
Kab Rohil	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	2	3.400.000.000,00	100,00	100,00
Kab Rohil	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	1	6.075.000.000,00	14,29	15,05
TOTAL SEKTOR KESEHATAN		25.659.767.500,00	2,19	10	9.496.210.800,00	4,42	0,81

Berdasarkan tabel di atas, anggaran tidak efisien paling banyak berasal dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp19.532.400.000,00 dan anggaran tidak efektif paling banyak berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp6.075.000.000,00. Dari Provinsi dan Kabupaten yang dievaluasi, rata-rata anggaran yang tidak efisien sebesar Rp2.138.313.958,33 dan rata-rata anggaran yang tidak efektif sebesar Rp791.350.900,00.

c) Sektor Ketahanan Pangan

Terdapat 26 sub kegiatan atau 13,90% dari total sub kegiatan yang berpotensi tidak efektif senilai Rp8.419.746.388,00 atau 4,26% dari total anggaran, dan yang berpotensi tidak efisien sebesar Rp448.881.000,00 atau 0,23% dari total anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.16
Sub Kegiatan dan Anggaran Berpotensi Tidak Efektif dan Tidak Efisien di Sektor Ketahanan Pangan

Nama Pemda	Nama OPD	Tidak Efisien	% Tidak Efisien	Tidak Efektif		% Tidak Efektif	
				Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
Provinsi Riau	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	0	-	0,00	0,00
Provinsi Riau	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	145.000.000,00	0,30	12	2.524.165.841,00	57,14	5,27
Provinsi Riau	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	0	-	0,00	0,00
Provinsi Riau	Dinas Perkebunan	-	-	5	1.181.982.947,00	55,56	29,63
Provinsi Riau	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15.000.000,00	0,05	0	-	0,00	0,00
Kab Bengkalis	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	0	-	0,00	0,00
Kab Bengkalis	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	-	0	-	0,00	0,00
Kab Bengkalis	Dinas Perikanan	-	-	7	394.713.400,00	21,21	3,62
Kab Bengkalis	Dinas Perkebunan	-	-	0	-	0,00	0,00
Kab Bengkalis	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	123.881.000,00	0,52	0	-	0,00	0,00
Kab Rohul	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	-	0	-	0,00	0,00
Kab Rohul	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	0	-	0,00	0,00
Kab Rohul	Dinas Peternakan dan Perkebunan	-	-	1	3.221.959.200,00	16,67	35,42
Kab Rohul	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	165.000.000,00	4,45	1	1.096.925.000,00	10,00	29,61
Kab Rohil	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	0	-	0,00	0,00
Kab Rohil	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	-	0	-	0,00	0,00
Kab Rohil	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	0	-	0,00	0,00
TOTAL SEKTOR KETAHANAN PANGAN		448.881.000,00	0,23	26	8.419.746.388,00	13,90	4,26

Berdasarkan tabel di atas, anggaran tidak efisien paling banyak berasal dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp165.000.000,00 dan anggaran tidak efektif paling banyak berasal dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Rokan Hulu sebesar

Rp3.221.959.200,00. Dari Provinsi dan Kabupaten yang dievaluasi, rata-rata anggaran yang tidak efisien sebesar Rp21.705.785,71 dan rata-rata anggaran yang tidak efektif sebesar Rp421.112.896,21.

5. Penyebab Tidak Efektif

Terdapat 43 sub kegiatan yang tidak efektif, dimana 60,47% atau sebanyak 26 sub kegiatan tidak efektif disebabkan tidak memadainya kualitas substansi, sedangkan 39,53% atau sebanyak 17 sub kegiatan tidak efektif disebabkan ketidakselarasan kegiatan.

Tabel 2.17
Penyebab Tidak Efektif Berdasarkan Pemerintah Daerah

Nama Pemda	Jumlah Sub Kegiatan Tidak Efektif	Penyebab Tidak Efektif				
		Kualitas Substansi	Keselarasan Kegiatan	Keselarasan Program	Keselarasan Sas PD	Keselaras an Satra Pemda
KABUPATEN BENGKALIS	10	10	0	0	0	0
KABUPATEN ROKAN HILIR	5	4	1	0	0	0
KABUPATEN ROKAN HULU	11	11	0	0	0	0
PROVINSI RIAU	17	1	16	0	0	0
TOTAL	43	26	17	0	0	0

BAB III

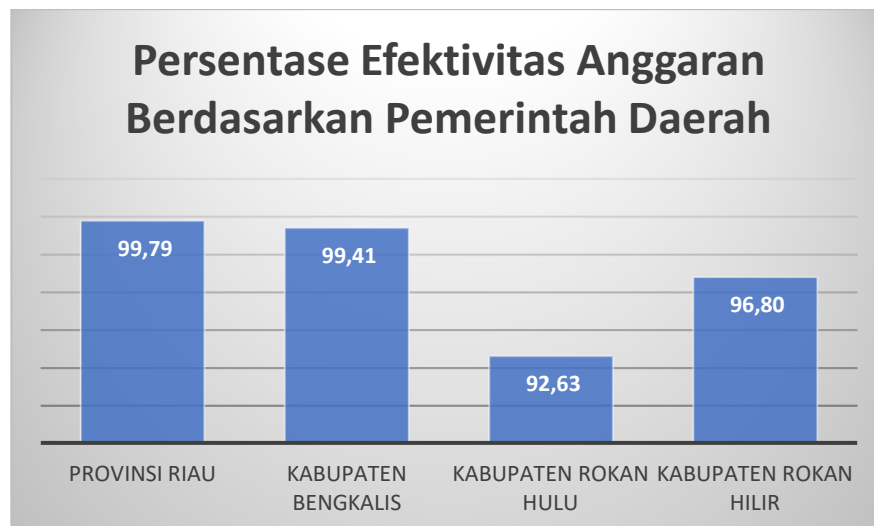
PENUTUP

Berdasarkan analisis data terhadap hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah Tahun 2022 yang dilakukan di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir, didapatkan simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang dievaluasi, persentase efektivitas anggaran tertinggi berdasarkan Pemda adalah Provinsi Riau, sedangkan berdasarkan sektor adalah Sektor Pendidikan.

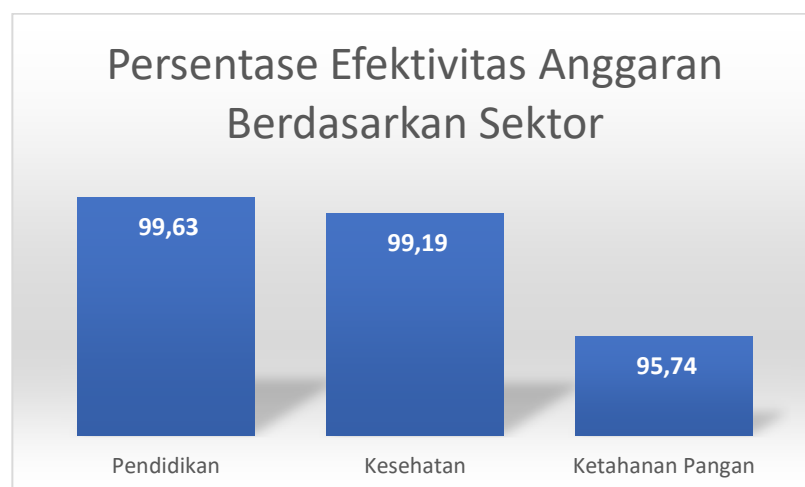
Grafik 3.1

Persentase Anggaran Efektif Berdasarkan Pemda



Grafik 3.2

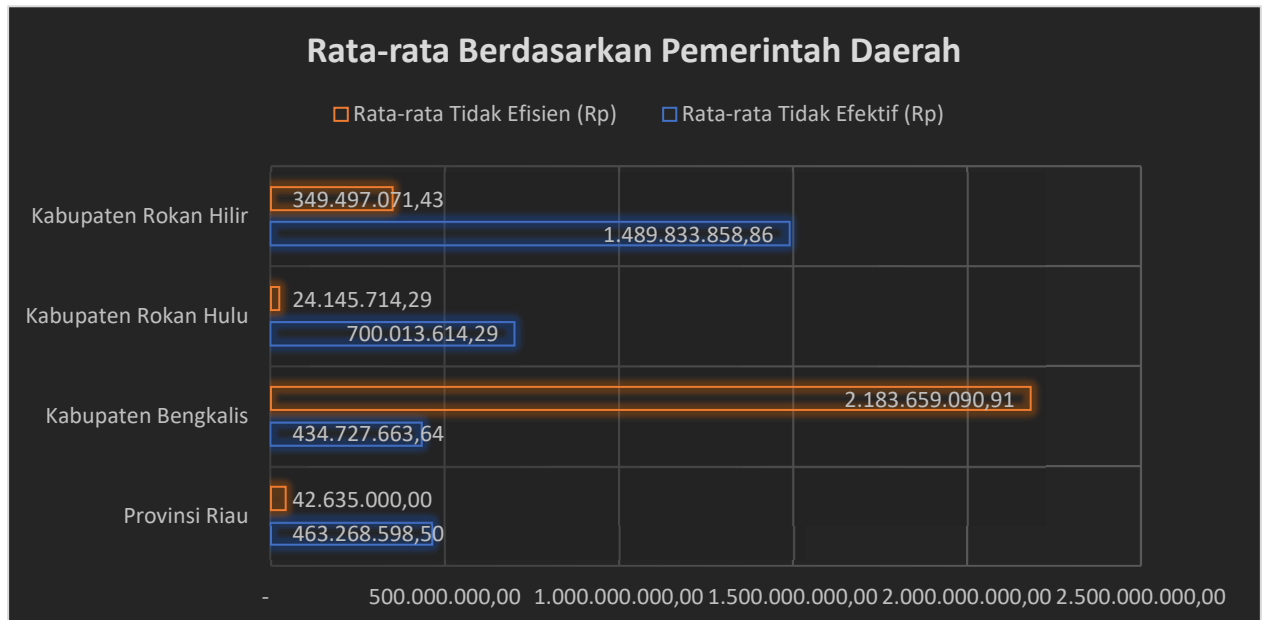
Persentase Anggaran Efektif Berdasarkan Sektor



- Berdasarkan Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang dievaluasi, rata-rata anggaran paling tidak efektif terdapat di Kabupaten Rokan Hilir sedangkan rata-rata anggaran paling tidak efisien terdapat di Kabupaten Bengkalis.

Grafik 3.3

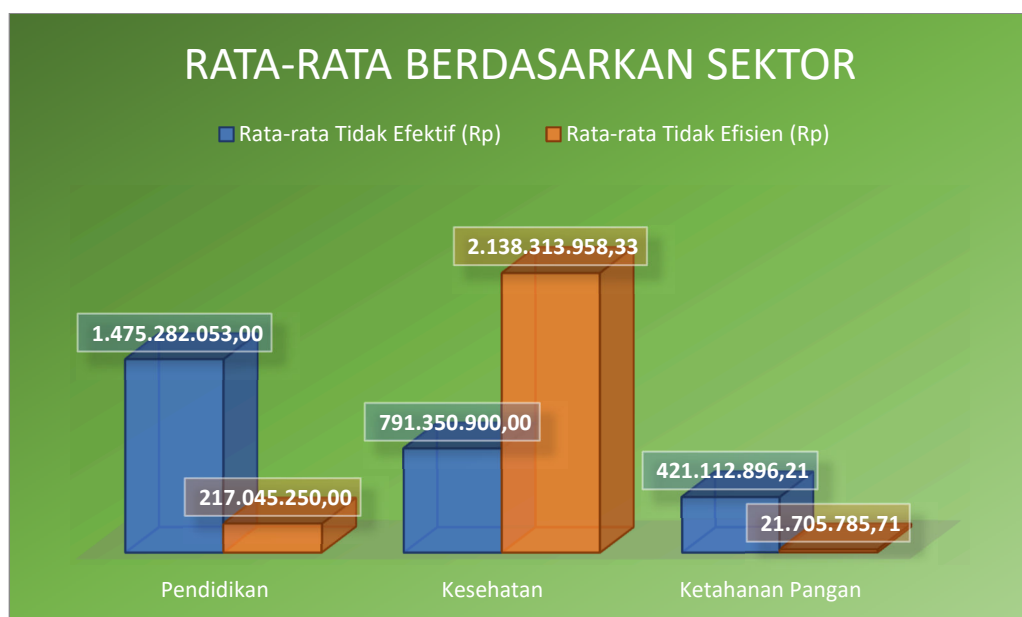
Rata-rata Anggaran Tidak Efektif dan Tidak Efisien Berdasarkan Pemda



- Berdasarkan 3 sektor yang dievaluasi, rata-rata anggaran paling tidak efektif terdapat pada Sektor Pendidikan sedangkan rata-rata anggaran paling tidak efisien terdapat pada Sektor Kesehatan.

Grafik 3.4

Rata-rata Anggaran Tidak Efektif dan Tidak Efisien Berdasarkan Sektor



4. Berdasarkan perangkat daerah yang dievaluasi di 1 provinsi dan 3 kabupaten, perangkat daerah dengan anggaran paling tidak efektif antara lain:
 - a) Provinsi Riau: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp2.524.165.841,00.
 - b) Kabupaten Bengkalis: Dinas Pendidikan sebesar Rp4.387.290.900,00.
 - c) Kabupaten Rokan Hulu: Dinas Peternakan dan Perkebunan sebesar Rp3.221.959.200,00.
 - d) Kabupaten Rokan Hilir: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6.075.000.000,00.
5. Berdasarkan perangkat daerah yang dievaluasi di 1 provinsi dan 3 kabupaten, perangkat daerah dengan anggaran paling tidak efisien antara lain:
 - a) Provinsi Riau: Dinas Pendidikan sebesar Rp181.080.000,00.
 - b) Kabupaten Bengkalis: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp19.532.400.000,00.
 - c) Kabupaten Rokan Hulu: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp165.000.000,00.
 - d) Kabupaten Rokan Hilir: Dinas Kesehatan sebesar Rp1.759.378.500,00.
6. Berdasarkan perangkat daerah yang dievaluasi di 1 provinsi dan 3 kabupaten, penyebab tidak efektifnya perencanaan dan penganggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah disebabkan oleh tidak memadainya kualitas substansi dan terdapat ketidakselarasan kegiatan.

Grafik 3.5
Penyebab Tidak Efektif Berdasarkan Pemerintah Daerah

